

**KEHARUSAN PARTAI POLITIK MENDORONG HADIRNYA PARTISIPASI PUBLIK
DAN TERCIPTANYA LAPISAN SOSIAL MASYARAKAT BARU
DALAM ERA GLOBALISASI**

Azmi Muttaqin

Peneliti pada Lembaga Kajian Strategis untuk Informatika Rakyat (LEKSTRA)

Email: azmi_taqin@yahoo.com

Abstract

This paper describes the role of political parties as the ideal political machine that functions encourage public participation in the context of a democratic political system.

At the same time globalization provide broad access for the citizens of the State to establish global networks. Meeting of the party's strategic role and globalization spawned a new social layer.

Key Word: political parties, democracy, globalization.

A. Pengantar

Partai Politik secara sederhana diartikan sebagai organisasi politik yang mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi dan kepentingan, tuntutan dan dukungan bersama para anggota yang berbanding lurus dengan ideologi terukurnya. Kemudian melakukan agregasi-agregasi kepentingan melalui proses secara konstitusional yaitu perebutan kekuasaan dengan koridor pesta demokrasi (pemilu raya).¹ Agar fungsi-fungsi partai ini bisa bekerja, partai yang modern adalah partai yang bertindak atas dasar program guna mencapai tujuan-tujuan tertentu mereka.

Mereka mengikuti sebuah kebijakan yang telah disepakati, dan mereka diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip pokok yang didasarkan pada peraturan-peraturan, keanggotaan,

organisasi-organisasi lokal, panitia-panitia, kongres-kongres, kewajiban-kewajiban, dan lain-lain.²

Partai politik berdiri berdasarkan asumsi bahwa dalam sebuah negara yang menganut paham sistem demokrasi meletakkan kedaulatan di tangan rakyat atau mengatur tentang jalannya kehidupan bersama sesuai dengan konsensus-konsensus yang telah dibuat. Secara teoritis, demokrasi mendapatkan pembenaran berdasarkan teori perjanjian sosial membentuk organisasi negara beserta instrumen-instrumen politiknya untuk kepentingan seluruh rakyat (*res publica*), untuk menjamin adanya dan berlanjutnya tata tertib sosial (*social order*).

Dan sisi hukum, perjanjian tersebut terwujud dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mendapatkan otoritas dan *constituent power*, yaitu rakyat itu sendiri. Sebagai wujud dan ide kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa

¹ Abdul Ban Azed dan Makmur Amin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

² Antonina Yermakova & Valentine Ratnikov, *"Kelas dan Perjuangan Kelas"*, Yogyakarta, Penerbit bu, 2002.

rakyatlah yang sesungguhnya memiliki negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang sesungguhnya berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.³

Bila kita mengikuti sejarah politik pola pergeseran kekuasaan di Indonesia, bahwa kekuasaan yang dulu hanya bisa dimiliki dan diatur oleh segelintir kelompok elit, bilangan yang kalau dihitung tidak sampai sejumput tangan saja. Soeharto misalnya, membangun rezim di bawah atap Orde Baru dan menjadikan militer (Dwi fungsi ABRI) dan Golkar (*hegemonic party*) sebagai instrumen politik pendukung struktur kekuasaannya. Pola pemerintahan yang sentralistik tersebut praktis mempersempit ruang bagi daerah dalam wujud otonominya.

Dan rezim Orba yang menancapkan kekuasaannya lebih dari 3 (tiga) dasawarsa melalui pendekatan hegemonik⁴ berangsur-angsur mengalami penurunan tensi kekuatan (kekuasaan depotism monolitik ini kemudian terkoreksi pasar yang sudah tidak lagi sejalan dengannya), reformasi

merupakan niscayaan dalam sistem pemerintahan *dekanden* Orde Baru, yang pada Waktu itu dianggap oleh rakyat sebagai satu-satunya kambing hitam penyebab dan terjadinya krisis multi dimensi yang tak juga menemukan ujungnya ini.

Tarikan politik dari produk hasil reformasi kemudian menghantarkan rakyat sipil untuk dapat menyinggahi langgam kursi kekuasaan. Dampak pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik⁵. Paradigma politik baru ini merupakan letupan besar dan terbukanya ruang bagi publik untuk andil menyusun proses perubahan politik, dengan demikian arah politik yang demokratis dapat sedikit terlihat dari gerbang reformasi.

Kelahiran partai—partai politik baru merupakan salah satu bongkahan dan ledakan reformasi, karena prasarat demokrasi harus menyediakan institusi kunci bagi pengembangan demokrasi, yaitu terbangunnya partai politik.⁶

Di sini partai menemukan eksistensinya jika dapat benar-benar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai organisasi politik yang mempunyai legitimasi konstitusional untuk mengartikulasikan keinginan rakyat. Partai politik haruslah mengetahui segala hal tentang

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi P, 2005, hal. 144.

⁴ Soeharto pada akhir kekuasaannya mengendurkan keta'atannya kepada pasar bebas dan intervensi secara paksa dengan dihambatnya mekanisme laju pasar modal. Hal ini salah satunya bisa dilihat dengan dikurangnya pajak negara secara signifikan dan impor mobil asal korea (MOBNAS) yang sahamnya mayoritas dipegang oleh pangeran-pangeran istana Cendana sendiri. Gaya ekonomi nepotisme yang disubstitusikan kepada negara merupakan penetrasi ekonomi yang tidak kompatibel terhadap pasar bebas. Pada perjalanannya geliat pasar ini ditangkap oleh beberapa elit nasional kemudian menskenariokan "momentum (reformasi) untuk menjatuhkannya" baca hal 8.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

⁵ Format Otonomi daerah sampai sekarang masih berupaya menemukan pola demokrasi autentiknya (transparatif, partisipatoris dan *public accountability*). Perlu diingat bahwa pelaksanaan otonomi daerah ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001 ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden.

⁶ Meski perkembangan aktual terakhir ini, pesatnya perkembangan media cetak dan elektronik, serta LSM, telah mengurangi peran dominan partai dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Tetapi sampai kapanpun partai akan tetap menjadi kerangka institusional bagi proses representasi dan pemerintahan. Baca: FS. Swantoro, *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*, Jakarta, SSS, 2004, hal. 111.

penyelenggaraan negara paralel dengan kebutuhan dan kepentingan seluruh rakyat. Maka Parpol harus mengintegrasikan dirinya di dalam ritme nadi rakyat dan mampu menghadirkannya di segala ruang dan waktu dalam realitas kompetisi global.

Lebih dari itu, tugas Parpol melakukan transformasi sosial politik (consentization/penyadaran) terhadap anggota partai dan rakyat pada umumnya, menytir istilah Antonio Gramsci, kewajiban kerja para intelektual organik untuk melakukan *revolusi hegemoni integral*. Selanjutnya memfasilitasi agar rakyat mampu merumuskan tujuan perubahan mereka sendiri, menjadi pelaksana pergerakan, melakukan evaluasi, dan menindaklanjuti tindakan mereka sebagai bagian dan kesadaran penuh berpolitik (partisipasi publik), hingga rangsang kesadaran itu muncul dan diri dalam mereka, tidak terintervensi dari luar apalagi dipaksakan untuk penerapannya.

Terbangunnya kesadaran kritis analisis tersebut diharapkan mampu melibatkan rakyat untuk mampu menghirup nafas dalam atmosfer perkembangan globalisasi. Bukan kemudian terjebak dalam pemaknaan faham demokrasi prosedural yang masih bersifat oligarkis, di mana ketika partai politik berkompetisi tanpa menggunakan integritas, maka ketika ia berhasil mendulang konstituen dan otoritas melalui kursi-kursi kekuasaan di lembaga-lembaga negara maka personal-personal partai⁷ yang menempati pos-pos lembaga negara

⁷ Penulis sengaja menyebut personal karena hubungan anggota partai (*patronage party*) dengan partai asal, dewasa ini tidak ada relasi impersonal yang terukur dengan ideologi partainya, dan kalaupun ada hanyalah pada tataran pragmatisme.

kemudian menjalankan kebijakannya sesuai dengan selera subyektif elit tanpa nyentuh kepentingan rakyat. Untuk tidak mau disebut menurut Louis Althusser, menggunakan legitimasi negara untuk mengatur kehidupan rakyat secara *paksa/coersive (repressive state apparatus)* yang secara lebih distingtif hal ini diperoleh penyelenggara negara melalui hegemoni negara dengan devinisi kebenaran absolut ideologinya (*ideological state apparatus*).⁸

Maraknya model selera penguasa partai (*oligarky party*) seperti inilah yang memenuhi langit-langit kognitif politik mereka, hingga melupakan tugas partai untuk membangun demokrasi substansial dan partisipatoris demi kepentingan publik. Seperti mendorong terbangunnya partisipasi publik dan transparansi publik, sekaligus sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) partai dan lembaga-lembaga penyelenggara negara kepada publik yang telah memberikan kekuasaan dan kewenangan melalui konstitusi, terakhimya hanya menjadi pengandaian rakyat belaka.

Jika partai politik tidak mengetahui segala sesuatu tentang aspirasi dan kebutuhan rakyat dalam menghadapi akselerasi globalisasi, maka dengan sendirinya tidak dapat menjalankan fungsi kedaulatannya, yaitu menyediakan ruang bagi publik untuk terlibat penuh berpartisipasi di dalamnya. Maka akibatnya, Parpol menjadi organ yang terpisah dan otonom dari keinginan publik dan pemerintahan yang dihasilkannya pun berubah menjadi pemerintahan

⁸ Baca Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*, Jakarta, Yayasan Indonesiatara, 2004, hal. 7.

biokratik otoriter.⁹ Padahal partisipasi rakyat melalui instrument partai inilah yang bisa mendorong adanya transparansi publik yang meliputi keterbukaan informasi publik dan keterbukaan berupa hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Keterbukaan atau transparansi dalam perkembangannya menjadi salah satu prinsip atau pilar negara demokrasi demi terwujudnya partisipasi publik dengan kewenangan kontrol sosialnya. Transparansi dan kontrol sosial dibutuhkan untuk dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan negara demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi rakyat secara langsung yang didorong oleh parpol seharusnya menjadi alternatif perjuangan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in prese*.¹⁰ Tetapi perlu juga dipahami bahwa kontrol publik terhadap negara disertai kesadaran kritis rakyat dalam memaknai demokrasi dan makna kebersamaan maka hanya akan menimbulkan pembangkangan-pembangkangan kelompok dan lebih parah lagi terjadi situasi *social chaos*.

B. Kegagalan Partai Politik Merespon Issue-issue Global

⁹ Baca Mangabeira, Roberto Unger, *Law In Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, New York, The Free Press, 1976, hal. 58.

¹⁰ Asshiddiqie, Op. Cit., hal. 161-162. Bandingkan dengan pendapat Robert A. Dahl yang menyatakan sumber informasi alternatif sebagai salah satu ciri negara demokrasi modern. Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Men Jela Jah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, atau *On Democracy*, Penerjemah A. Rahman Zainuddm, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 118.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

Penjelasan dan realitas partai politik di atas secara ilustratif dapat dilihat dari kegagalan partai politik di Indonesia dalam merespons deras laju globalisasi dengan membungkamnya partai-partai besar dalam mensikapi arah besar kemenangan korporasi perusahaan raksasa asing melalui kontrak eksplorasi migas Blok Cepu oleh Exxon yang tidak sebanding, kemudian perpanjangan kontrak pertambangan timah dan emas di Papua oleh PT. Freeport yang melakukan penipuan public, sejak ditemukannya hamparan emas di dasar sungai Papua tahun 1967 oleh Penjelajah Eropa. Koneksi pertambangan ini pada tahun 1991 diperpanjang hingga 50 tahun dengan tanpa mengindahkan transparansi publik dan melibatkan partisipasi publik Papua.¹¹

Hal ini diperparah lagi dengan berlomba-lombanya masing-masing rezim yang yang silih berganti dalam menjual aset-aset produktif negara melalui privatisasi BUMN, membungkamnya negara akan wacana revitalisasi Bulog yang menyebabkan ketahanan pangan kita semakin rentan dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan penguasa-penguasa Republik ini tidak mempunyai keberpihakan terhadap nasib rakyat, nota bene yang dilahirkan partai politik. Fenomena perkembangan parpol Indonesia ini bila dibandingkan dengan kemajuan dan kelahiran-kelahiran parpol di belahan dunia ketiga lain menjadi diametral.

Iklim partisipasi publik yang demokratis ini dapat digairahkan apabila kita mau menengok peran

¹¹ Riswanda Imawan, "Di Bawah Gunung Kemakmuran", *Kompas*, 13 Maret 2006.

parpol di negara-negara Amerika Latin, seperti Bolivia,, Venezuela, Argentina, Brasil, kemudian negara di Asia negara seperti Filipina, Vietnam, Iran, Palestina, dll. dalam mengatasi problem perkembangan kapitalisme paling mutakhir yang menjadikan bumi ini menjadi datar sehingga ruang dan waktu menyempit ke dalam kompetisi masyarakat global yang menguntungkan negara-negara neokolonialisme.

Para revisionis kapitalisme selalu me-metamorfosis tubuhnya sebagai reaksi resistensi atas kebijakannya yang nilai eksploitatif agar tampil lebih elegan. Mutasi bentuk ini seharusnya disikapi oleh politisi-politisi partai yang berkuasa di negaraa dunia ketiga (*periveri*) dengan melakukan pembenahan-pembenahan regulasi pemerintahannya. Kebijakan ini dilakukan untuk menghadapi arus dampak buruk globalisasi.

Sikap/respon ini terlihat dengan bersatunya negara-negara Amerika Latin dalam panji boliviarian menentang kepentingan kapitalis Amerika dengan melakukan pengajuan ulang kontrak karya pertambangan dan menderegulasi perjanjian ekonomi oleh lembaga-lembaga dunia, seperti World Bank, WTO dan negara-negara besar donatur utang.¹²

Kemudian Partai Akbayan di Filipina yang pada tahun 1998 mengadakan Kongres I pendirian Akbayan. Dalam kongres ini diputuskan bahwa Akbayan menjadi 'alat politik' kaum revolusioner menghadapi pertarungan *electoral* untuk mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah,

terutama di tingkat lokal. Seperti kata Joel Rocamora "membikin saluran orang kiri untuk pertarungan *electoral* dan pemerintahan."¹³

Meskipun secara 'formal' tidak disebutkan bahwa Akbayan merupakan parpol yang berideologi sosialis, namun Akbayan menurut Joel Rocamora. mantan Ketua Akbayan, secara tegas menegaskan bahwa partainya sebagai partai yang membela rakyat miskin, menolak imperialisme Amerika Serikat, menolak neo-liberalisme, pro-demokrasi partisipatoris dan sosialisme partisipatoris. Karena itu Joel menyatakan "Apakah itu bukan Sosialisme Maksudnya meskipun tidak ada 'ideologi formal' yang dicantumkan tetapi dalam program, praktek, dan keanggotaan (80 persen orang miskin) cita-cita sosialisme secara dinamis dan kreatif diperjuangkan dari bawah dan atas.

C. Arus Gelombang Demokratisasi

Perubahan demi perubahan peta demokrasi terus bergelombang, isi temuan dari Freedom House, membawa Samuel P. Huntington (*The Third Wave: Democratization in the late 21th Century*, 1991) menulis dan memperkuat dengan analisis historisnya tentang Gelombang Demokratisasi Ketiga, yaitu tatkala terjadi transisi dari rezim-rezim yang non-demokratis ke rezim-rezim yang demokratis yang terjadi pada kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak dan pada transisi yang menuju arah yang sebaliknya (arus balik demokrasi, yang sekarang menjadi ancaman serius pasca reformasi di Indonesia). Huntington

¹² Baca Zely Ariane, "Dunia Lain Yang Alternatif Bisa (*Position Paper Serial*)", Pidato Tahunan Hugo Chavez, (SERIAL, 2005), hal. 7.

¹³ Baca Joel Rocamora, *Meretas Hal-Hal Mustahil: Pembangunan Partai dan Local Governance di Filipina*, (Indoprogres, 17.06/06).

membagi gelombang demokratisasi menjadi tiga,¹⁴ yaitu:

- Gelombang panjang demokratisasi pertama (1828-1926) yang berakar pada revolusi Prancis dan Revolusi Amerika.
- Gelombang balik pertama (1922-1942) yang berakar dan tumbuhnya negara-negara fasis di Italia dan Jerman, yang kemudian menyebarkan kudeta militer di Portugal (1926), Brasil dan Argentina (1930), otoritarianisme di Uruguay (1933), kudeta dan perang saudara yang mematikan negara Republik Spanyol (1936).
- Gelombang demokratisasi kedua (1943-1962) yang berakar pada pendudukan oleh tentara sekutu pada masa Perang Dunia ke II dan sesudahnya (termasuk yang sebelumnya otoriter).
- Gelombang balik kedua (1958-1975) yang ditandai dengan naiknya rezim otoritarian di Amerika Latin (Peru, Uruguay, Kuba, Bolivia, Ekuador, Brasil, dan Argentina), Asia (Pakistan — Zia, Korea — Rhee, Indonesia — Soekarno, Filipina — Marcos, India — Gandhi, Taiwan — KMT) Eropa (Yunani, Turki), dan Afrika (hampir seluruh Afrika, khususnya Nigeria tahun 1966 yang dikudeta oleh Militer).
- Gelombang demokratisasi ketiga (1974 -) yang dimulai dengan meninggalnya Jendral Franco di Spanyol yang

mengakhiri rezim otoriter/militer di Eropa Tengah pada tahun 1975 ketika Raja Juan Carlos dengan bantuan PM Adolfo Suarez memperoleh persetujuan parlemen dan rakyat untuk menyusun konstitusi baru yang demokratis, dan di Portugal sekelompok perwira militer melakukan kudeta kepada Marcello Caetano, Sang Diktator jatuh. Selama setahun Portugal mengalami transisi yang penuh drama, namun akhirnya kelompok pro demokrasi menjadi pemenang. Di Turki kelompok militer mengundurkan diri dari politik (1983), di Filipina Marcos jatuh oleh *People Power* (1987), Hongaria berubah menjadi multi-partai (1988), di Polandia Partai Solidaritas pimpinan Walesa berhasil mengubah Polandia menjadi negara non-komunis (1990), intervensi AS mengakhiri rezim marxis-leninis di Grenada (1983) dan diktator Noriega di Panama (1989).

Perubahan-perubahan besar bergelombang seiring pola tuntutan dan menguatnya globalisasi, dan kapitalisme membawa peranan penting bagi gelombang demokratisasi di seluruh dunia dan yang terakhir gelombang demokratisasi di Timur Tengah yang lebih mempertontonkan arus balik demokrasi.

D. Perubahan Sosial Melalui Partai Politik

Tugas Parpol menciptakan struktur lapisan sosial masyarakat baru

¹⁴ Baca Riant D. Nugroho & Tn S. Hanurita, "Tantangan Indonesia Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang", Jakarta, Gramedia, 2005, hal. 3.

melalui fungsi, rekrutmen, fungsi mediasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi pemecah konflik, fungsi perebutan kekuasaan, berjalan jauh lebih sulit. Luasnya cakupan fungsi inilah yang salah satunya membedakan partai dengan LSM, organisasi massa, atau gerakan sosial pada umumnya. Pencerahan politik dan rekrutmen kader di tengah-tengah rakyat yang sudah mengalienasikan dirinya dalam ranah politik memang tugas yang amat berat. Rakyat sudah mengalami demoralisasi terhadap partai politik.

Delegitimasi parpol tersebut sebenarnya bukan hanya semata-mata *platform* politik yang tidak didukung rakyat kebanyakan, akan tetapi justru oleh watak elit parpol yang belum mampu menerjemahkan dan membuat gagasan-gagasan visioner *inheren* menjadi seperangkat mekanisme yang operasional dan menjamin sistem struktur partai yang terdukung ke dalam konsensi konstitusi partainya (ideologi ukur).

Sepinya komitmen dan konsistensi perancang parpol inilah yang kemudian mengarah pada terbentuknya banyak parpol oligarkis dan longgar akan kontrol parpol untuk meregulasi anggota-anggotanya yang melakukan tindakan-tindakan korup dan insubordinasi terhadap garis kebijakan partai.

Sebenarnya dalam perjalanan era reformasi ini ruang demokrasi terbuka lebar pasca tumbangannya rezim militer dan pemerintahan sentralistik, serta terbukanya kran kebebasan. Namun harapan reformasi menjadi paradoks ketika di tengah klaim keberhasilan pembangunan, sebagian rakyat mengalami penurunan kesejahteraan. Produk yang dihasilkan reformasi ini

menjadi amburadul karena reformasi hanya dimaknai sebagai perubahan untuk menumbangkan rezim Soeharto, tanpa format dan proyeksi yang jelas maka kekuasaan yang seharusnya dikontrol dan dipegang oleh rakyat melalui partai, tetapi malah beralih hanya kepada rezim-rezim yang sama buruknya.

Otonomi daerah yang merupakan bagian dan produk reformasi hanya merupakan peralihan dari kekuasaan elit Pusat kepada elit Daerah tanpa membawa rakyat untuk berpartisipasi kedalam pola pergeseran peralihan tersebut. Tanpa partisipasi dan kontrol publik inilah kemudian setiap kali penyusunan RAPBN/RAPBD tidak pernah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan *rakyat*, (anggaran tersedot untuk biaya belanja aparatur negara) bahkan para anggota dewan yang konon katanya terhormat, malah asyik menganggarkan kenaikan gajinya. Akibatnya rakyatlah yang semakin termiskinkan dalam sebuah sistem yang mengkondisikan nasib mereka menjadi kelompok yang tidak patut dipikirkan (termarjinalkan).

Hal ini bisa dilihat dan jumlah penduduk rakyat miskin (Rumah Tangga Miskin) yang hampir separo (49%) dan total 220 juta penduduk (data: World Bank), data ini menjadikan bangsa ini menyandang predikat *The Sickman from South East Asia*. Sebuah realitas yang meng-amini pernyataan Pemenang Nobel untuk ilmu ekonomi Amartya Sen yang mengatakan berulang kali dalam studinya, bahwa kemiskinan bukanlah pertama-tama *lack of income* tetapi *lack of capability*.¹⁵

¹⁵ Realitas bahwa kelaparan di dunia bukanlah disebabkan oleh kurangnya ketersediaan makanan tetapi kurangnya demokrasi. Negara-negara dengan pertumbuhan
Vol. 12, No. 2, Juli 2012

Dan lebih aneh lagi bila dikomparasikan dengan data jumlah RTM versi Pemerintah (BPS) hanya 11,9% jumlah penduduk miskin di Indonesia. Jumlah selisih yang cukup banyak antara World Bank dan BPS (acuan data ini kemudian menjadi rujukan seberapa besar Pemerintah menganggarkan subsidi untuk rakyat miskin, seperti Raskin (beras miskin), BLT (Bantuan Langsung Tunai) Jamkesmas, dan lain-lain yang menjadi rahasia umum bila subsidi-subsidi ini tidak implementatif dan salah sasaran. Seperti subsidi raskin yang anggaran subsidinya (dan APBN) tidak mampu menyediakan pagu beras untuk mengcover semua penduduk miskin. Karena sebenarnya jumlah penduduk miskin jauh lebih banyak dari data yang dibuat oleh BPS.¹⁶

Kemudian ditambah lagi masalah perbedaan data dari Menteri Pertanian dan Bulog soal persediaan beras belum lama ini yang menyebabkan para spekulan beras meraup keuntungan ketika harga beras terus merangkak naik dan akhirnya kita harus mengimpor beras, ditambah kerancuan data antara BPS dan TNP2K (lembaga baru yang langsung bertanggung jawab kepada Wapres) dalam menentukan data RTM, atau bahkan anggaran yang tak sampai kepada peruntukannya.¹⁷ Dan masih banyak lagi data-data dalam hal ini masih rancu di tengah-tengah desakan kompetisi globalisasi yang

ekonomi yang baik sering kali sebagian rakyatnya mengalami kelaparan, sedangkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi, tetapi mempunyai demokrasi yang berjalan dengan baik, dapat mencegah kelaparan berkat adanya tekanan partai politik terhadap korporatisme negara.

¹⁶ Meledaknya jumlah penduduk miskin sebenarnya bermula dan *side effect* kenaikan harga BBM yang mendomino pada inflasi harga kebutuhan pokok lain.

¹⁷ Baca Sulistoni, Gatot dan Hendriardi, "Anggaran tak Sampai", Somasi NTB, 2004.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

mengharuskan era keterbukaan/transparansi, keakuratan data, legalisasi dokumen, sertifikasi, yang menjadi nilai kapital sendiri.¹⁸

Sebagaimana diungkapkan oleh James Madison "Pemerintah bentukan rakyat tetapi tanpa informasi dan transparansi kepada rakyat tidak lain sebuah lelucon atau tragedi atau keduanya. Pengetahuan akan selalu menindas ketidaktahuan. Dan rakyat yang ingin mengatur dirinya sendiri harus mempersenjatai diri dengan kekuatan yang diberikan oleh pengetahuan.¹⁹

Menjadi tugas wajib Parpol untuk melakukan komunikasi politik dan pendidikan politik kepada rakyat

¹⁸ Walaupun sebenarnya desakan globalisasi formal terhadap negara-negara berkembang untuk melakukan transparansi data merupakan wajah hipokrit neo-kapitalisme, karena rumus perusahaan transnasional menetapkan tanggungjawab sosial hanya sebagai *lips service* dengan pretensi mencari simpati dan keamanan kepentingan kapital mereka saja. Hal ini bisa dilihat ketika dulu Exxon mengkritik model transparansi (*open society*), karena tanpa transparansi ia memakai strategi perusahaan yang menyisihkan sedikit biaya sosial dan akumulasi kapital keuntungannya sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Tetapi perkembangan terakhir Exxon meninggalkan model lama dan menganggap konsep transparansi sebagai *policy* yang paling ideal untuk menekan negara-negara yang menancapkan dirinya sebagai *good governance*. Pergeseran roda tuntutan pasar ini yang kemudian mendesak transparansi pendapatan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan keuntungan pertahunnya sebagai prasyarat transparansi sektor perpajakan (*good governance*). Dari perubahan inilah banyak sekali pengusaha-pengusaha nasional menjadi hancur (*take-over*) karena tidak siap berkompetisi dengan perusahaan besar Trans Nasional. Pola actual ini bisa dilihat dari pernyataan George Soros ketika menghadiri diskusi yang bertajuk "*Indonesian Economic & Political Perspective 2007*" pada salah satu stasiun tv swasta yang difasilitasi oleh Tempo di akhir Tahun 2006, "bahwa moraliti tidak datang sebagai partisipan pasar. Apabila pasar tidak tersistem maka untuk membenahinya bukan pada para spekulan, tapi mengatur ulang regulasinya (transparansi)." Pemikiran inilah yang membedakan Soros dengan Mahatir yang menggunakan konsep Tobin Teori (negara tetap sebagai katalisator pasar) dalam menjalankan mekanisme pasar, tetapi pada tahun 1998 hantaman krisis moneter melibas ekonomi kawasan Asia dan Mahatir menyebut Soros sebagai spekulan tak bermoral yang bertanggungjawab atas terjadinya krisis moneter di wilayah Asia.

¹⁹ Albert Van Zyl, "Budget Dictionary, Budget Information Service IDASA", 2000, hal. 43, dalam Jamaruddin, *Indikator Transparansi Anggaran*, hal. 15.

Vol. 12, No. 2, Juli 2012

sehingga mereka mampu berpartisipasi pada domain politik yang ada, seperti proses perumusan dan terbentuknya kebijakan publik yang menyangkut panjang bulatnya nasib rakyat banyak.

Kerja politik ini bisa dilakukan dengan membentuk komunitas-komunitas diskusi kecil yang bergerak seperti pembelahan sistem sel pada lapisan-lapisan masyarakat bawah. Karenanya Parpol harus ikut mendorong gagasan sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi masyarakat secara *genuine (empowered deliberative democracy)* sekaligus menaikkan kapasitas masyarakat yang masih rentan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini Habermas menjelaskan pentingnya memahami partisipasi secara luas di luar mekanisme perwakilan, "memperluas perdebatan politik dalam parlemen ke masyarakat sipil (*zivilgesellschaft*)". Bukan hanya aparat negara dan para wakil-wakil rakyat, melainkan juga seluruh warga negara berpartisipasi dalam wacana politis untuk pengambilan keputusan politis bersama.

Melalui radikalisasi konsep negara hukum klasik "tempat" kedaulatan rakyat bergeser dan proses pengambilan keputusan di parlemen ke proses partisipatif dalam ruang publik. Kedaulatan rakyat bukanlah "substansi" yang membeku di dalam perkumpulan para wakil rakyat, melainkan juga terdapat di berbagai forum warganegara, organisasi non-pemerintah, gerakan sosial atau singkatnya di manapun diskursus tentang kepentingan bersama

warganegara

dilancarkan.²⁰

E. Akbayan (Partai Aksi Rakyat/Citizens' Action Party): Model Partai Partisipatoris

Bentuk sistem demokrasi partisipatonis ini juga diterapkan oleh Parpol Akbayan di Filipina. Partai ini meletakkan unit-unit lapisan masyarakat sebagai kekuatan politik independen yang bebas bergerak melakukan kontrol sosial kepada negara, bahkan kepada Akbayan sendiri. Artinya Akbayan merupakan sebuah proyek koalisi dari berbagai blok, kelompok, dan individu dan berbagai tradisi kiri dan progresif yang beragam, yang diawali dan tumbuh dalam watak koalisi yang kuat.

Pada satu sisi, Akbayan menyediakan ruang yang luas dan menjadi muara dan berbagai perbedaan dalam membangun konsensus. Pada sisi lainnya, partai menjadi relatif cair dan lambat dalam merespon berbagai tantangan, peluang dan hambatan. Tetapi in-efisiensi²¹ ini tidak kemudian menjadikan partai yang membuka lebar ruang kontrol bagi publik/anggota partai untuk kembali menyerahkan mandat tertinggi konstitusi kepada segelintir elit politik partai seperti layaknya partai-partai kebanyakan selama ini terapkan (partai oligarkis).

Soal ideologi Akbayan menyeruak dalam Kongres tahun 2001, ketika anggota partai dan kaum independen, bukan anggota blok politik

²⁰ Baca, "Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi, Menuju Pemerintahan Terbuka", hal. 72.

²¹ Efisiensi merupakan tindakan yang didengungkan oleh sistem kapitalisme global beserta seperangkat aturan-aturan liberalisasi kebijakan dalam segala sektor, baik swasta maupun pemerintahan, demi ditekannya biaya produksi dan biaya sosial (efisiensi) maka ia mentasbihkan proses dehumanisasi.

kiri, yang jumlahnya sudah mencapai 50 persen dan anggota Akbayan membawa perdebatan ideologi Akbayan ke dalam Kongres tahun 2001. Akhimya, dirumuskan bahwa ideologi Akbayan adalah "Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris."²²

Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris adalah sebuah kritik atas model demokrasi konservatif, baik atas demokrasi liberal yang menjaga paham kapitalisme maupun demokrasi terpimpin (komunisme) yang sudah hancur di Eropa Timur. Di bawah kedua model tersebut rakyat secara mendasar telah disingkirkan. Dalam demokrasi wakilan di Filipina, partisipasi rakyat telah dipinggirkan oleh politik elit dan patronase.

Sementara itu, model sosialisme lama lebih fokus pada arena negara, memberikan sedikit pemikiran dan bahkan meremehkan pentingnya melembagakan proses dan mekanisme partisipasi dan kontrol rakyat dalam lapangan ekonomi, politik dan budaya. Pendiri model Negara-negara sosialis bahkan tumbuh mendekati negara yang absolut. Hanya satu partai diijinkan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, bahkan memonopoli kebenaran untuk dirinya sendiri, yang berujung pada kediktatoran satu partai. Model ini juga menghasilkan ekonomi komando di mana keuntungan pribadi dan korupsi menjadi mengakar, menciptakan hubungan otoritarian di dalam negara, dan partai.

Proposal yang ditawarkan Parpol layakannya menjadikan demokrasi dan sosialisme menjadi kenyataan sejati

yang dapat dilakukan tidak hanya dengan cara mendemokratiskan negara (demokrasi prosedural) tapi juga dengan menjamin kekuasaan otonom masyarakat sipil dan secara konstan mengikat negara. Ini adalah cara untuk memperkuat karakter demokratis, horizontal dan otonom dalam reaksi di antara masyarakat sipil. Ini juga berarti memberdayakan individu dalam entitas kolektif.

Perjuangan sosialis adalah sebuah kritik dan gerakan oposisi atas kapitalisme. Sebagai sebuah perjuangan kongkrit untuk melindungi kelas pekerja dan rakyat miskin dan untuk memukul balik kekuatan pasar bebas serta mendapatkan ruang yang semakin luas bagi kelas pekerja untuk mengontrol. Akbayan memajukan kerangka ekonomi-pasar campuran, di mana sektor sosial mengikat pasar untuk mengembangkan kekuatan produktif, melindungi pekerja industri dan sektor agraria, yang secara kreatif meluaskan sektor-sektor sosial dan memperjuangkan daya saing industri lokal di dalam pasar global.

Dalam kongres pertama juga diputuskan bahwa keanggotaan partai adalah individual dan sukarela. Keanggotaan individual ini penting untuk mengetahui secara persis keanggotaan partai. Sebab ada preseden klaim-klaim keanggotaan ormas seringkali tidak obyektif dan dilebih-lebihkan, sehingga partai tidak tahu persis kekuatan dirinya sendiri. Menurut Joel Rocamora, Akbayan tidak menawarkan konsep keanggotaan secara organisasi atau *underbouw*, sebab dianggap kurang sejalan dengan demokrasi partisipatoris. Selain itu,

²² Lihat Wilson, "Menegakkan Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris", Salemba Tengah, 13 Januari 2006.

pengalaman dengan CPP²³ membuat blok politik yang mendirikan Akbayan sangat mengutamakan pembangunan demokrasi partisipatoris dan basis. "Semua organisasi sektoral dan organisasi komunitas, bebas menentukan sendiri, tanpa bisa disetir oleh para pimpinan Akbayan."

F. Penutup

Timbulnya perkembangan partai politik partisipatoris ideal di atas ditopang tiga komponen kombinasi ideal (*modus vivendi*), yaitu kepemimpinan yang bersifat impersonal dan kuat (punya integritas) sebagai poros pegangan, kesamaan faham (ideologi/kesadaran bersama menentukan aras hidup). Kesamaan faham ini sebagai kolektifitas politik juga termaktub di dalam semangat partisipatoris sebagai landasan tata tertib AD/ART yang menjadikan anggota/kader partai sebagai pemegang mandat tertinggi di dalam konstitusi partai.

Kemudian terbingkainya jejaring yang solid sebagai struktur yang terdukung dalam partai. Jika terbangun jaringan pusat sampai bawah yang kuat, struktur jejaring dan terus melakukan ritual-ritual tugas partai dan dikembangkan secara luas dan benar seperti dengan membentuk komunitas-komunitas otonom dan melakukan

diskusi secara periodik sampai pada tingkat terkecil seperti sistem pembelahan sel kemudian melakukan aksi dan refleksi.

Dalam pengertian jejaring yang terkonsolidir, maka reorientasi terhadap nilai-nilai pendidikan harus senantiasa diingat, bahwa jejaring yang solid itu haruslah berdikari dan merdeka. Kemerdekaan itu secara sederhana dapat diurai menjadi tiga macam komponen: (1) berdiri sendiri (*self-reliance*), yaitu otonomi setiap anggota partai dalam memutuskan setiap apa yang harus dikerjakan dan mempertanggungjawabkan kenapa hal itu dikerjakan. Pengertian di sini anggota/kader partai selalu mengedepankan nilai-nilai kebersahaan, integritas tinggi, konsistensi; (2) tidak tergantung pada orang lain (*independence* penekanan bahwa partai harus berani lepas dan sistem partai lama (oligarky partai), beserta kebiasaan-kebiasaya juga bisa dimaknai tidak boros (*finance* dan figur/patronase bukanlah satu-satunya motorik partai); (3) kemudian. dapat mengatur dirinya sendiri (*self-determination*), yaitu kesanggupan kelompok sosial baru menentukan nasibnya sendiri dan tidak menggantungkan Peruntungannya pada kelompok sosial lain.

Reorganisasi partai partisipatoris yang menyandarkan dirinya dalam kerangka basis pengetahuan (*The power of knowledge*) dan mampu melakukan transformasi pendidikan politik kepada rakyat sehingga mampu menangkap pesan tidak hanya dan perubahan dan tuntutan lokal regional, nasional letapi lebih pada pergeseran nilai-nilai global. Materi pengetahuan ini juga bisa berfungsi semacam receiver/penerima

²³ *Communist Party of the Philippines* (CPP) yang didirikan pada 1968. CPP menganut ideologi Maoisn yang ketika itu sedang bergerak 'lebih kiri lagi' dengan apa yang disebut "Revolusi Budaya." Dalam strategi ini gerakan bersenjata menjadi motor utama dalam insurreksi. Meskipun membangun basis sosial yang kuat dalam menentang kediktatoran, CPP tetap menganggap 'perjuangan bersenjata' untuk merebut kekuasaan tidak dapat disubstitusikan oleh gerakan massa. Sesuatu yang nantinya menjadi penyebab awal krisis di dalam CPP pasca kediktatoran Marcos. Lihat "Menegakkan Demokrasi Paibs ipatoris dan Sosialisme Partisipatoris, Tentang Akbayan di Filipina", yang dimuat di ke1uargabuz.blogspot.com

gelombang yang dihembuskan oleh globalisasi. Jika proses penyadaran/transformatasi *power of knowledge* gagal dikerjakan oleh partai kepada rakyat, maka gelombang globalisasi akan kehilangan ruhnya atau bahkan rakyat hanya menangkap sinyal globalisasi hanya sebatas gaya hidup dan bukan substansinya.

Disini perlu dibangun model partai politik berbasis kebangsaan yang dan awal dirancang untuk mengintegrasikan cita-cita kerakyatan dan prinsip-prinsip demokrasi dibawa ke dalam perilaku partai.²⁴ Model partai seperti tersebutlah yang diharapkan menjadi model *mimesis* (tiru meniru)²⁵ oleh kemunculan partai-partai baru, entah itu partai lokal yang lahir dan gerakan-gerakan rakyat yang mempunyai kesadaran terbuka, mengenal susunan dunia dan riwayatnya.

Daftar Pustaka

Azed, Abdul Ban dan Makmur Amin, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

²⁴ Partai yang mampu menggunakan demokrasi autentik untuk mengatur kehidupan rumah tangganya. Artinya pimpinan partai dipilih secara demokratis dan berada di bawah kontrol massa kadernya. Partai harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan pimpinan partai bisa diberhentikan sebelum waktunya oleh massa kader partai.

²⁵ Teori *Mimesis* (Teori hasrat segi tiga) ini dijelaskan oleh Rene Girard sebagai bentuk hasrat bagaimana ia muncul. Kalau kita ingin suatu kelompok berperilaku seperti X (obyek) maka kita akan berupaya menimbulkan suatu hasrat kelompok pada X melalui kehadiran "model" (mediator) yang punya pada hasrat X juga. Jika kehadiran tersebut menemukan polanya maka sebagai suatu analisis, berenti pada pembicaraan tentang perilaku (obyek/X) saja tanpa upaya identifikasi pada mediator (model) dan hasrat yang berkembang, analisis dan hasrat hanya akan menjamah puncak gunung es saja.

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

Ariane, Zely, "Dunia Lain Yang Alternatif Bisa (*Position Paper Serial*)", Pidato Tahunan Hugo Chavez, SERIAL, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Konstitusi P, 2005.

Gatot dan Hendriardi, "Anggaran tak Sampai", Somasi NTB, 2004.

Imawan, Riswanda, "Di Bawah Gunung Kemakmuran", *Kompas*, 13 Maret 2006.

Kleden, Ignas, *Masyarakat dan Negara Sebuah Persoalan*, Jakarta, Yayasan Indonesiatara, 2004.

Mangabeira, Roberto Unger, *Law In Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, New York: The Free Press, 1976.

Nugroho, Riant D. & Tn S. Hanurita, "Tantangan Indonesia Solusi Pembangunan Politik Negara Berkembang", Jakarta, Gramedia, 2005.

Rocamora, Joel, *Meretas Hal-Hal Mustahil: Pembangunan Partai dan Local Governance di Filipina*, Indoprogres, 17.06/06.

Swantoro, FS., *Meneropong Sistem Kepartaian Indonesia 2020*, Jakarta, SSS, 2004.

Wilson, "Menegakkan Demokrasi Partisipatoris dan Sosialisme Partisipatoris", Salemba Tengah, 13 Januari 2006.

Yermakova, Antonina & Valentine Ratnikov, "Kelas dan Perjuangan Kelas", Yogyakarta: Penerbit bu, 2002.

Zyl, Albert Van, "Budget Dictionary, Budget Information Service IDASA", 2000, hal. 43, dalam Jamaruddin, *Indikator Transparansi Anggaran*, hal. 15.

Azmi Muttaqin

Keharusan Partai Politik
Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik
Dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru
Dalam era globalisasi